

The Discourse Battle on the Establishment of Confucian State University in The Bangka Belitung Islands Province

Izcha Pricispa¹, Yang Azzahra², Nandini Putri³, Herza Herza^{4*}

^{1,2,3,4} Universitas Bangka Belitung, Jl. Merdeka No. 4, Kecamatan Merawang,
Kepulauan Bangka Belitung, 33126, Indonesia

Email: herzazul@ubb.ac.id*

Abstract

The Province of Bangka Belitung Islands is designated by the central government for the establishment of the Confucian State University (Perguruan Tinggi Negeri/PTN Konghucu). However, the government's initiative to build this Confucian State University has sparked diverse reactions among the residents of Bangka Belitung: some opposing it, some supporting it, and others questioning it. This study analyzed how each party constructs its discourse to sway public opinion. Furthermore, it investigated the social and legal repercussions of this discourse battle, with the intention of providing insights for considerations or recommendations to relevant stakeholders. This research method is descriptive qualitative, involving primary and secondary data collection. Primary data was gathered through direct observation, interviews, and Focus Group Discussions (FGD). Meanwhile, secondary data was sourced from online news, books, journals, and previous research findings. Through this study, researchers identify the varying discourses presented by each party, reflecting both favorable and unfavorable perspectives.

Keywords: *Confucianism; Province of Bangka Belitung Islands; Discourse; Islamic Ummah Alliance*

Pertarungan Wacana Perguruan Tinggi Negeri Konghucu Di Kepulauan Bangka Belitung

Abstrak

Bangka Belitung merupakan daerah yang ditunjuk oleh pemerintah pusat sebagai tempat pembangunan Perguruan Tinggi Negeri (PTN) Konghucu. Program pemerintah pusat terkait pembangunan PTN Konghucu ini nyatanya menimbulkan respon yang beragam dari masyarakat Bangka Belitung, ada yang menolak, ada yang mendukung, dan ada pula yang sekadar mempertanyakan. Penelitian ini akan melihat bagaimana wacana yang dikonstruksi oleh masing-masing pihak dalam memenangkan pandangan publik. Lebih lanjut, riset ini juga akan melihat implikasi sosial dan hukum dari hadirnya pertarungan wacana tersebut, dengan diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan atau rekomendasi kepada pihak terkait. Metode yang digunakan dalam riset ini adalah kualitatif deskriptif dengan proses pengumpulan data primer dan sekunder. Data primer diperoleh langsung melalui observasi, wawancara, dan FGD (Focus Group Discussion), sedangkan data sekunder diperoleh melalui berita online, buku, jurnal dan hasil-hasil penelitian terdahulu. Dari hasil penelitian ini, peneliti menemukan wacana yang dikonstruksikan dari masing-masing pihak yang Pro dan Kontra.

Kata kunci: Konghucu; Bangka Belitung; Wacana; Aliansi Umat Islam

LATAR BELAKANG

Bangka Belitung merupakan salah satu provinsi dengan penduduk etnis Tionghoa terbesar di Indonesia. Masyarakat etnis Tionghoa dengan agama utamanya adalah Konghucu, terhitung jumlahnya cukup banyak di Bangka Belitung, meski di tengah dominasi mayoritas etnis Melayu dengan ciri khas agama Islam (Ibrahim et al., 2022b). Dalam sejarahnya, bahkan etnis Tionghoa hadir di Pulau Bangka sebelum Indonesia berdiri (Ibrahim et al., 2022a). Hubungan sosial antara Tionghoa dan Melayu di Bangka Belitung terjalin dengan semboyan yang dikenal dengan istilah "Tong Ngin Fan Ngin Jit Jong" yang mempunyai arti, Tionghoa dan Melayu sama saja (Sya et al., 2019). Semboyan tersebut semacam menjadi pengikat bagi kedua etnis tersebut dalam melakukan praktik kehidupan sosial sehari-hari.

Masyarakat yang beragama Konghucu maupun Islam mempunyai hak yang sama di mata hukum, termasuk mengenai pemenuhan hak pendidikan baik nasional maupun agama. Tujuan pendidikan sesuai UU No. 20 Tahun 2003 Pasal 3 menjadi dasar pembangunan sekolah-sekolah dan perguruan tinggi untuk memfasilitasi anak bangsa dalam mengembangkan dan membentuk watak serta peradaban. Proses pendewasaan dalam pendidikan ini mencakup semua dimensi kehidupan manusia : fisik, psikologis, spiritual-moral, dan spiritual-religius (Burhanuddin et al., 2019). Salah satunya yaitu Pendidikan Agama di sekolah dan perguruan tinggi dalam dimensi spiritual-religius. Pendidikan Agama memegang peranan penting dalam pendidikan nasional. Undang-Undang No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 36 mengenai Pengembangan Kurikulum.

Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Agama (Kemenag) RI berencana untuk mendirikan sebuah Perguruan Tinggi Negeri Pendidikan Agama Konghucu berskala Internasional di Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Rencana pendirian tersebut mendapat penolakan dari sekelompok orang yang mengatasnamakan diri sebagai Aliansi Umat Islam Bangka Belitung dan Aliansi Umat Islam Bangka Tengah (Sakti, 2022; Tribunnews, 2023). Isu ini sebenarnya telah

muncul di berita *online* sejak 2019 yang diterbitkan oleh babel.kemenag.go.id dengan judul "Pernyataan Sikap MUI Terhadap Stkhin". Berita tersebut memuat hasil pertemuan MUI dan Ka Kanwil Kemenag Bangka Belitung yaitu pernyataan sikap menolak dari MUI Babel terhadap pembangunan Perguruan Tinggi Agama Konghucu di Bangka Belitung.

Program pembangunan Perguruan Tinggi Konghucu di Bangka Belitung kembali diangkat pada tahun 2022 ketika Gubernur Babel, Erzaldi dalam sambutan acara Syukuran Hari Jadi Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia (MATAKIN) ke-99, mengumumkan bahwa Babel ditunjuk pemerintah pusat untuk mengembangkan pendidikan Konghucu. Pembangunan PTN Konghucu tidak hanya didukung oleh Pemda, namun ada juga dari Akademisi dan tokoh-tokoh masyarakat Babel.

Penolakan dari aliansi mengatasnamakan umat Islam sejak 2019 tidak mengubah keadaan bahkan memunculkan sikap dari pemerintah daerah yang dirasa mendukung pembangunan PTN Konghucu ini. Kondisi ini menimbulkan 2 kelompok yaitu pro dan kontra, tentu saja hal ini menarik perhatian peneliti untuk melihat wacana yang dibangun dari masing-masing kelompok dalam pembangunan PTN Konghucu di Provinsi Bangka Belitung. Terkait isu ini sebelumnya belum ada riset mengenai PTN Konghucu itu sendiri, namun hanya ada beberapa penulis yang menyoroti isu PTN ini yang berbentuk tulisan artikel opini, salah satu penulis yang menyoroti hal tersebut ialah dari kalangan akademisi sosiologi yaitu Herza dalam tulisannya di *detikNews* dengan judul Tertanggalnya Hak Politis Warga Tionghoa Bangka Belitung. Tertera dalam artikel opini tersebut bahwa rencana pendirian PTN Konghucu terjadinya penolakan yang cukup kuat dari berbagai pihak yaitu kelompok Masyarakat yang mengatasnamakan aliansi umat Islam Bangka Tengah. Penolakan ini dengan alasan tidak tepat sasaran apabila didirikan di Bangka Belitung karena masih ada daerah lain yang dinilai lebih tepat dengan budayanya seperti di Singkawang, Kalimantan Barat yang mayoritas umat konghucu. Kemudian adanya pihak yang mendukung atas rencana pendirian PTN Konghucu dengan alasan yang mana umat konghucu juga hak setara atau hak yang sama dengan masyarakat melayu yaitu memiliki hak politis dalam menginginkan berdirinya kampus agama konghucu yang menjadi kebutuhan warga Tionghoa. Hal ini menjadi urgensi karena pendidikan agama konghucu dengan guru yang memiliki konsentrasi dalam bidang agama konghucu tersebut belum ada, jadi adanya PTN Konghucu untuk mencetak guru agama konghucu yang berkompeten. Penelitian ini ingin melihat bagaimana wacana yang dikonstruksi oleh masing-masing kelompok serta ingin mengetahui implikasi sosial dan hukum dari adanya pertarungan wacana pembangunan PTN konghucu ini.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian deskriptif bermaksud menggambarkan sifat sesuatu yang sedang berlangsung ketika penelitian dilakukan dan meneliti penyebab dari suatu gejala tertentu. Penelitian kualitatif deskriptif bertujuan untuk menggambarkan keadaan suatu fenomena dan menghasilkan generalisasi yang diturunkan dari proses induktif tentang kelompok, proses, aktivitas, atau situasi yang sedang dipelajari (Sugiyono, 2020).

Objek dari penelitian ini adalah dinamika pertarungan wacana yang terjadi di antara berbagai pihak dalam konteks menanggapi rencana pembangunan PTN

Konghucu di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah wawancara, observasi, dan *Focus Grup Discussion* (FGD). Proses pengumpulan data dilakukan dari bulan Juni hingga Oktober 2023.

Adapun wawancara dan observasi dilakukan kepada pihak Aliansi Umat Islam Bangka Belitung, Kementerian Agama Kabupaten Bangka Tengah, Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia (MATAKIN) Bangka Belitung, Tokoh dan Masyarakat Desa Batu Belubang (sebagai lokasi yang direncanakan untuk dibangun PTN Konghucu), Mahasiswa dan Dosen di Bangka Belitung, serta perwakilan Lembaga Adat Melayu (LAM) Bangka Belitung. Sementara itu FGD dilakukan pada tanggal 15 September 2023 dengan melibatkan berbagai unsur sebagai peserta, mulai dari ketua MATAKIN, perwakilan organisator di Universitas Bangka Belitung, Dosen dan Mahasiswa, Kepala Desa Batu Belubang dan lain-lain. Selain menjadikan data hasil wawancara, observasi, dan FGD sebagai data primer, dalam penelitian ini juga menggunakan data sekunder yang diperoleh dari berita online, buku, jurnal dan hasil-hasil penelitian terdahulu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam pembahasan ini peneliti akan menulis beberapa sub judul dalam rangka menjawab rumusan masalah. Melalui penelitian ini dapat kita lihat bagaimana strategi masing-masing dari pihak yang mendukung maupun menolak pembangunan PTN Konghucu di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Masing-masing pihak akan mengonstruksi wacana dengan cara mereka masing-masing.

Wacana merupakan perspektif yang dinarasikan sebagai kebenaran yang mutlak dan bersifat argumentatif yang seolah-olah itu adalah sebuah kebenaran bagi penutur. Kebenaran yang dinarasikan tidak terjadi dengan sendirinya tetapi melalui proses konstruksi realitas. Menurut Jorgensen dan Philips dalam (Herza et al., 2023)), wacana adalah jenis tindakan sosial yang berkontribusi pada pembentukan dunia sosial, pengetahuan, identitas, dan hubungan sosial, dan karena itu mempertahankan pola sosial tertentu. Wacana juga bisa dimaknai sebagai konstruksi dan semacam pengetahuan yang dibangun oleh beberapa orang yang mempunyai kepentingan yang sifatnya tidak absolut. Strategi untuk mempengaruhi orang lain sehingga wacana yang dikonstruksi menjadi sebuah kebenaran.

Dalam jurnal *Mediator*, Hamad menjelaskan bahwa hasil proses ini berbentuk wacana, yakni berupa Text (tulisan/grafis), Talks (wacana dalam wujud ucapan), Act (wacana dalam wujud tindakan), dan Artifact (wacana dalam wujud jejak). Sementara itu menurut (Barker, 2004), wacana dimaknai sebagai sebuah bentuk aksi sosial yang memainkan peran dalam memproduksi dunia sosial, termasuk pengetahuan, identitas, dan hubungan-hubungan sosial sehingga mempertahankan pola-pola yang spesifik. Oleh karenanya, analisis wacana menyingkapkan struktur-struktur tersebut dan meletakkan wacana di dalam relasi sosial, kultural, dan sejarah yang lebih luas (Barker, 2004; Udasmoro, 2018). Kemudian dalam teori Norman Fairclough terdapat tiga metode dalam menganalisis wacana yaitu meliputi, teks, *discourse practice*, dan *sociocultural practice* (Siswanto & Febriana, 2017). Hal terpenting untuk dipahami bahwa, sebuah wacana dapat memberi implikasi dalam memahami realitas dengan penelusuran konteks produksi teks, konsumsi teks, aspek sosial budaya yang mempengaruhi pembuatan teks.

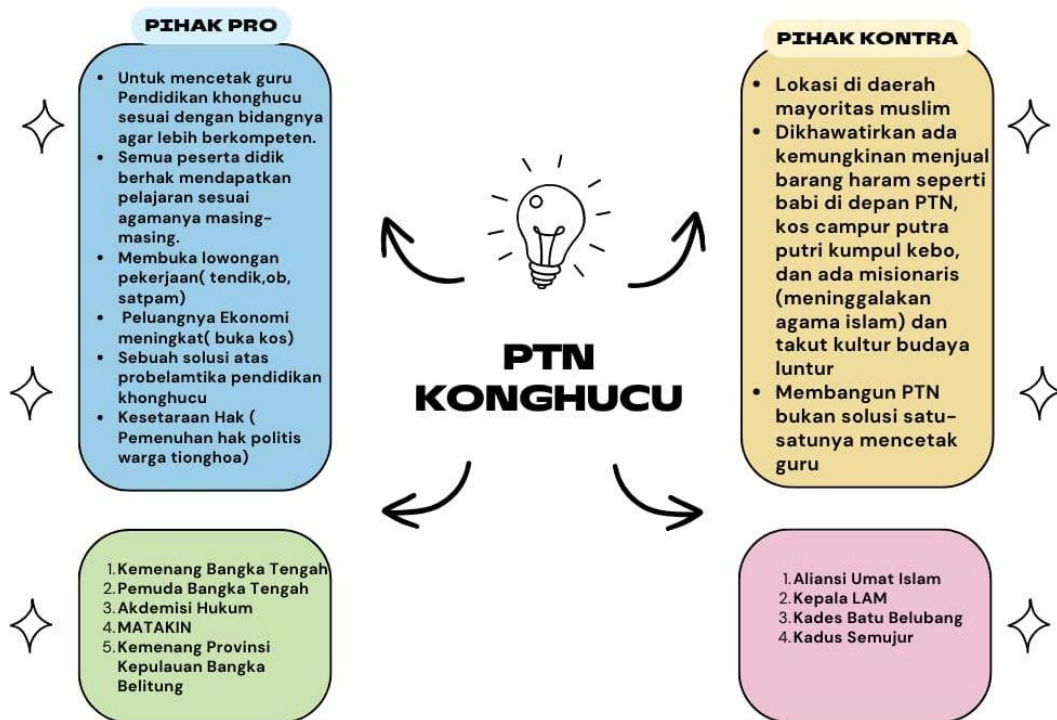
Di bawah ini peneliti akan menguraikan bagaimana wacana yang dimainkan dari pihak yang mendukung program pembangunan PTN Konghucu, setelahnya baru kemudian juga memaparkan bagaimana wacana yang dimainkan oleh pihak yang menolak/kontra terhadap pembangunan PTN Konghucu tersebut. 'Permainan' wacana inilah yang dimaknai dalam konteks penelitian ini sebagai pertarungan. Adapun pembahasan dalam tulisan ini akan dibagi menjadi tiga sub judul besar dan kemudian terbagi lagi menjadi beberapa poin kecil.

Pihak yang Menjadi “Pemain” dalam Pertarungan Wacana

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan peneliti, terpetakan beberapa pihak yang termasuk ke dalam kelompok yang mendukung, maupun yang menolak rencana pembangunan PTN Konghucu di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pihak yang mendukung terdiri dari tokoh dan masyarakat Konghucu, beberapa akademisi yang diwawancarai dan mengikuti FGD (utamanya dosen dan mahasiswa di lingkungan Universitas Bangka Belitung), dan sebagian kalangan anak muda di wilayah Batu Belubang yang menjadi wilayah rencana pembangunan PTN Konghucu. Mereka yang mendukung ini terlihat dari gagasan-gagasan secara verbal saat diwawancarai dan FGD, maupun disampaikan melalui tulisan-tulisan opini di media. Salah satunya pendapat dari Dr. Jeanne Darc Noviyanti Manik, S.H., M.Hum. yang menyampaikan bahwa secara politis dan hukum memang menjadi hak warga Konghucu untuk mendapatkan akses pendidikan agama sampai level perguruan tinggi. Secara ekonomi juga menurut Beliau dengan berdirinya PTN Konghucu tersebut akan menghidupkan geliat usaha masyarakat lokal di seputaran kampus, sebagaimana yang terjadi di UBB.

Sementara itu, pihak yang menolak rencana pembangunan PTN Konghucu ini terdiri dari orang-orang yang tergabung dalam kelompok Aliansi Umat Islam Bangka Belitung, pihak Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bangka Belitung, Ketua Lembaga Adat Melayu Bangka Belitung, dan juga ada beberapa dari kalangan akademisi. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan, salah satunya diungkapkan oleh Ketua Kemenag Kabupaten Bangka Tengah, H.M. Karyawan, S.Ag., orang yang tergabung dengan Aliansi Umat Islam Bangka Belitung yang menolak rencana pembangunan PTN Konghucu ini adalah orang-orang Eks Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dan Front Pembela Islam (FPI).

Gambar 1 Pihak-pihak terkait



Sumber: (Dokumentasi Peneliti, 2023)

Wacana yang Dimainkan Pihak yang Mendukung Pembangunan PTN Konghucu di Bangka Belitung

Berikut ini disampaikan wacana yang dimainkan oleh pihak yang mendukung pendirian PTN Konghucu di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pembahasan ini merupakan hasil dari analisis secara integratif dari data hasil observasi, wawancara dan FGD. Pembahasan dalam sub judul ini akan terbagi menjadi dua poin sebagai berikut.

1. PTN Konghucu Sebuah Solusi Atas Problematika Pendidikan Agama Konghucu

Pembangunan PTN Konghucu merupakan program pemerintah pusat yang menjadi *urgent* karena melihat kurangnya guru agama Konghucu di Indonesia, dan khususnya juga terjadi di Bangka Belitung. Realitas yang terjadi di lapangan adalah kebanyakan peserta didik Tionghoa yang beragama Konghucu tidak mendapatkan ajaran agama yang dianutnya. Dalam beberapa kasus menunjukkan kalau mereka justru mengikuti pelajaran agama lain. Kepala MATAKIN (HK) mengungkapkan bahwa

“ajaran agama Konghucu tidak bisa disamakan dengan ajaran agama lainnya”.
(Wawancara Kepala Matakina, 6 Agustus 2023).

Oleh karena itu, baginya rencana pembangun PTN ini sangat dibutuhkan oleh umatnya. Hal ini selaras dengan Joncto pasal 3 ayat (1) dan pasal 4 ayat (2) PP No 55

Tahun 2007 tentang pendidikan agama dan pendidikan keagamaan. Setiap orang berhak mendapatkan ilmu keagamaan sesuai dengan agama yang dianut.

Beragama merupakan hak yang melekat bagi setiap orang (HAM), sehingga pemerintah berencana untuk membangun perguruan tinggi ini. Dipilihnya Bangka Belitung dikarenakan memiliki masyarakat yang tingkat toleransi tinggi. Hal ini dilihat dari keharmonisan antara umat Melayu dan Cina yang sangat kental selaras dengan semboyan “Tong Ngin Fan Ngin Jit Jong” yang artinya Melayu dan China sama saja. Kemudian pemerintah pusat meminta Matakun Bangka Belitung untuk menyiapkan lahan pembangunannya dan hibah lahan tersebut berada di Bangka Tengah (Wawancara Kepala Matakun, 2023).

Gambar 2 Wawancara dengan Kepala MATAKUN



Sumber: (Dokumentasi Peneliti, 2023)

Pembangunan PTN Konghucu ini bertujuan untuk mencetak guru-guru agama Konghucu yang berkompeten dan mempunyai latar belakang pendidikan strata 1 agama Konghucu (wawancara Kepala Matakun, 2023). Contoh kasus persoalan tersebut disampaikan oleh Kepala Matakun, dimana peserta didik yang beragama Konghucu di bangku sekolahnya tidak mendapatkan pendidikan agama Konghucu. Sekolah tersebut malah menawarkan pelajaran agama yang bukan Konghucu seperti Islam ataupun Kristen maupun Katolik. Dengan ini memuat memaksa mereka mempelajari pendidikan agama yang tidak relevan dengan agama yang dianutnya. Kondisi ini menjadi masalah pendidikan agama di Bangka Belitung yang kemudian untuk menjawab persoalan tersebut dengan membangun PTN Konghucu.

Isu pembangunan PTN Konghucu sudah ada sejak tahun 2019 lalu akan tetapi isu tersebut sempat mereda setelah ada penolakan dari kelompok yang mengatasnamakan Aliansi Umat Islam dan juga terjadi pada tahun 2019. Tahun tersebut merupakan tahun politik. Kemudian isu ini kembali diberitakan di media pada tahun 2022. Berita tersebut memuat Erzaldi Rosman Djohan selaku Gubernur Kepulauan Bangka Belitung pada saat itu menyampaikan bahwa Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menunjuk Bangka Belitung sebagai pusat pengembangan dengan mendirikan perguruan tinggi negeri konghucu karena Bangka Belitung dianggap memiliki tingkat harmonisasi keagamaan tertinggi di Indonesia serta merujuk pada semboyan “Tongin Fan Ngin Jit Jong” yang mempunyai arti melayu cina sama saja.

2. Kesetaraan Hak (Pemenuhan Hak Politis Warga Tionghoa)

Menurut Kemenag Bangka Tengah, Agama lahir dari keberagaman. Beragama merupakan hak dasar/asasi bagi setiap orang termasuk juga dengan fasilitas keagamaan. Indonesia merupakan negara plural hal inilah yang menjadikan Indonesia

sebagai negara yang unik karena keberagaman yang ada di Indonesia dipayungi oleh toleransi ditambah dengan semboyan negara Indonesia “Bhineka Tunggal Ika” yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu.

UUD Negara Republik Indonesia pada Rumusan Pasal 28C ayat (1) menyatakan bahwa “*setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat Pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia*”. Oleh karenanya guru agama Konghucu yang berlatar belakang Strata 1 menjadi kebutuhan supaya ajaran agama Konghucu tidak hanya bisa dipelajari di sekolah akan tetapi bisa juga diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Gubernur BEM KM FH UBB 2023 (Yos) mengatakan bahwa keberagaman di Bangka Belitung menggambarkan kebersamaan. Pernyataan ini disampaikan dalam kegiatan FGD pada tanggal 15 September 2023.

Gambar 3 Kegiatan FGD



Sumber: (Dokumentasi Peneliti, 2023)

Wacana yang Dimainkan Pihak yang Menolak Pembangunan PTN Konghucu di Bangka Belitung

Berikut ini disampaikan bagaimana wacana yang dimainkan oleh pihak kontra atau yang menolak pembangunan PTN Konghucu di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pembahasan pada bagian ini terdiri dari tiga poin penting.

1. Sebuah Prinsip Menjaga Nilai-Nilai dan Budaya

Pihak kontra mengungkapkan mengenai sikap penolakan rencana pembangunan PTN Konghucu yang akan di bangun di Bangka Belitung. Salah satu informan tersebut yaitu Muhammad Kurnia sebagai akademisi berpendapat penolakan ini tidak semata-mata hanya kepentingan pribadi, namun merupakan kesepakatan bersama masyarakat dengan berbagai pertimbangan. Mereka mempertimbangkan titik lokasi yang tidak relevan dengan masyarakat setempat ditambah lagi rencana PTN ini akan didirikan berskala Internasional.

Rencana pembangunan ini pada awalnya terdapat kesimpangsiuran mengenai titik lokasinya, mulai dari di desa Air Mesu, desa Batu Belubang, desa Benteng hingga terakhir di perbatasan desa Batu Belubang dan desa Benteng. Masyarakat Bangka Tengah, khususnya desa Batu Belubang menyatakan sikap menolak pembangunan tersebut didirikan di wilayah mereka dengan merilis video pernyataan sikap menolak setelah mengadakan audiensi. Penolakan dari pihak kontra ini adalah pemukiman tersebut merupakan wilayah mayoritas umat muslim sehingga tidak relevan jika berada

disitu. Titik lokasi ini disampaikan langsung oleh camat Pangkalan Baru yang telah mengukur lokasi tersebut, bahwasannya lokasi tersebut berada di perbatasan Batu Belubang dan Benteng. Persoalannya adalah tanah tersebut lebih condong ke batu Belubang yang merupakan pemukiman umat muslim.

Selanjutnya, pembangunan ini dikhawatirkan dapat mengganggu sendi-sendi keharmonisan masyarakat melayu china yang telah hidup berdamping dengan baik. Hal ini disampaikan oleh Kepala desa Batu Belubang dalam *Focus Group Discussion* yang diselenggarakan oleh peneliti dengan menghadirkan beberapa pihak terkait pada tanggal 15 September 2023.

Gambar 4 Foto bersama setelah kegiatan FGD



Sumber: (Dokumentasi Peneliti, 2023)

Selanjutnya, jika pembangunan ini didirikan dapat membawa dampak perubahan kultur budaya. Disampaikan kembali oleh Muhammad Kurnia bahwa dengan adanya pembangunan ini tidak menutup kemungkinan untuk melakukan aktivitas atau perilaku yang bertentangan dengan nilai budaya setempat. Bisa saja mereka menjual makanan non halal, atau kos-kosan yang tidak memisahkan laki-laki dan wanita yang bisa saja menjadi kesempatan untuk kumpul kebo dan lain-lainya. Sedangkan perilaku tersebut sangat berbeda jauh dengan nilai budaya masyarakat setempat. Sehingga, jika perilaku ini hadir di tengah-tengah masyarakat melayu islam yang masih kental dengan nilai budayanya dapat memicu keharmonisan dan lebih jauh bisa saja nilai budaya lokal yang akan luntur. Dengan itu, mereka ingin tetap menjaga keharmonisan itu dan nilai budaya yang mereka anut dengan menolak pembangunan PTN Konghucu.

Melihat dari kondisi Bangka Belitung yang didominasi dengan melayu Islam tentu pandangan ini dipengaruhi oleh ideologi setempat. Sehingga, kekhawatiran ini menjadi catatan penting dalam mempertimbangkan sikap seseorang sebagai bagian dari kelompok.

2. Membangun PTN bukan satu-satunya solusi mencetak guru

Rencana PTN Konghucu ini merupakan proyek pemerintah yang menjadi satu-satunya pembangunan pertama yang berbasis agama dengan langsung status negeri. Tujuan yang disampaikan oleh pemerintah pusat adalah ditujukan untuk mencetak guru agama Konghucu. Berdasarkan wawancara penelitian, salah satu dari pihak kontra yaitu Bustami Rahman selaku akademisi mempertanyakan status negeri yang

melekat pada pembangunan Perguruan Tinggi ini dan juga mewanti-wanti timbulnya konflik sosial atas kecemburuan status ini.

Mengingat agama Konghucu merupakan agama yang baru diakui diantara agama lainnya seperti Islam, Kristen, Katolik, Hindu dan Budhha, sehingga PTN ini terlalu muda untuk buru-buru membangun sekolah dengan label negeri ini. Bustami Rahman juga menegaskan bahwasannya pembangunan pendidikan bisa di mulai lebih dulu dengan tingkat swasta baru negeri. Dengan ini dapat dilihat kesungguhan dan kesiapan dari pihak terkait.

Persoalan kekurangan guru dan menjawab kebutuhan guru bukan lah dengan mendirikan universitas solusinya. Hal ini mengingat proses pembangunannya yang begitu panjang, yang kemudian akan memperlambat proses untuk mencetak guru.

“Yang namanya mencetak seorang guru itu kan bukan suatu yang instan, kemudian seberapa besar kebutuhan, kenapa tidak mencetak ditempat selain di Bangka, kemudian nanti sudah berhasil dibawa ke Bangka dan kami tidak akan membatasi” (Wawancara Muhammad Kurnia, 29 Agustus 2023)

Dalam usaha untuk mencetak guru hal ini bisa saja dilakukan dengan memaksimalkan perguruan tinggi yang sudah ada. Berdasarkan hasil penelusuran peneliti, sekolah tinggi agama Konghucu sebenarnya telah ada dibangun tepatnya di Jawa Tengah (Wikipedia) dengan status Swasta. Sekolah Tinggi ini diresmikan pada 19 Februari 2021 dengan memiliki program studi Pendidikan Agama Konghucu.

3. Misionaris Konghucu di Bangka Belitung

Dari hasil penelitian ini pembangunan PTN Konghucu dipandang memiliki misi lain dan tujuan yang tidak hanya sekedar mencetak guru agama saja, tetapi ada misi lain yang ingin dibawa yaitu misionaris. Misionaris yang dipahami disini adalah usaha untuk menyebarkan agama yang di anut dan berharap agar oranglain dapat mengikuti agama yang disebar.

“Mencetak guru ini sebenarnya hanya bersifat normatif saja, selanjutnyakan mereka ada misi yang lain seperti misionaris” (Wawancara Muhammad Kurnia, 29 Agustus 2023)

Masyarakat Bangka Tengah khususnya desa Batu Belubang adalah daerah yang mayoritas Islam, asumsi misionaris ini tentu dapat membuat keresahan di daerah tersebut.

Analisis Wacana Norman Fairclough

Wacana yang dimainkan berbagai pihak pro dan kontra yang diuraikan diatas memiliki makna yang dapat dianalisis dalam perspektif Norman Fairclough dengan tidak metodenya yaitu, Teks, *Discourse Practice*, *Sociocultural Practice* :

1. Teks, merupakan analisis yang meliputi representasi relasi dan identitas
Berdasarkan hasil wawancara peneliti, Peneliti menemukan wacana Pihak yang pro/setuju dalam teks dari hasil wawancara Matakun yaitu *“ajaran agama Konghucu tidak bisa disamakan dengan ajaran agama lainnya”*. Teks tersebut memperlihatkan bahwa terdapat usaha penegasan melalui identitas Konghucu yang tidak bisa disamakan dengan agama lain sehingga perlu rasanya untuk didukung pembangunan PTN Konghucu. Selanjutnya dalam wacana pihak

Kontra, bahwa teks adanya misionaris ini menunjukkan kekuasaan dari umat muslim sebagai mayoritas di Bangka Belitung untuk menolak adanya PTN dari umat Konghucu.

2. *Discourse Practice*, merupakan usaha praktik untuk mengemas teks yang akan dikonsumsi publik.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti pada pihak pro/setuju melalui narasi undang-undang seperti UUD Negara Republik Indonesia pada Rumusan Pasal 28C ayat (1). Narasi Undang-undang tersebut dimainkan di ruang-ruang publik untuk memperkuat pembangunan PTN Konghucu. Selanjutnya dalam pihak kontra adalah usaha praktik wacana yang digunakan Persoalan kekurangan guru dan menjawab kebutuhan guru bukan lah dengan mendirikan universitas solusinya. Wacana tersebut ingin disampaikan label universitas yang berencana pada PTN Konghucu ini dapat membuat hal yang tidak wajar.

3. *Sociocultural Practice*, yaitu memahami teks-teks yang di wacanakan oleh pihak-pihak yang terdiri dari situasional, instusional, dan social.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti pada pihak pro/setuju melalui Gubernur BEM KM FH UBB 2023 (Yos) mengatakan bahwa keberagaman di Bangka Belitung menggambarkan kebersamaan. Teks tersebut dipahami wacana yang dibangun untuk mendukung PTN Konghucu adalah melalui situasional Bangka Belitung dikenal dengan tingkat toleransi tinggi di Indonesia. Keberagaman ras, agama dan suku di Bangka Belitung bukan hal yang baru. Selanjutnya dalam pihak kontra melalui wacana yang disampaikan Muhammad Kurnia bahwa dengan adanya pembangunan ini tidak menutup kemungkinan untuk melakukan aktivitas atau perilaku yang bertentangan dengan nilai budaya setempat. Wacana tersebut mencerminkan kondisi Bangka Belitung meski dengan keberagaman budaya, namun terdapat Budaya Melayu yang masih sangat kental. Situasi ini memperkuat penolakan pada pihak Kontra yang khawatir terjadinya pencampuran budaya

Implikasi Sosial dan Hukum dari Pertarungan Wacana

Implikasi adalah akibat yang timbul dari adanya penerapan suatu program atau kebijakan yang dapat berdampak baik atau buruk terhadap pihak-pihak yang menjadi sasaran pelaksanaan program atau kebijakan tersebut (Silalahi). Implikasi dalam penelitian ini ditemukan adalah implikasi sosial dan hukum yang memiliki 3 point penting yaitu ;

1. Menggalakkan Program Moderasi Agama

Hadirnya rencana pembangunan PTN Konghucu ini dapat mempengaruhi tingkat toleransi pada masyarakat Bangka Belitung (Wawancara Kemenag Bangka Tengah, 2023). Penolakan PTN ini dianggap sebuah bentuk intoleransi antar umat karena dianggap membatasi pergerakan Umat Konghucu dalam mendapatkan hak-haknya. Dengan ini Kemenag Bangka Tengah berkomitmen setelah mereka menginterpretasi adanya penolakan ini sebagai sebuah gejala bahwa masyarakat menjadi intoleran dengan menginisiasi program Moderasi beragama. Program Moderasi Agama ini dirancang untuk memberikan pemahaman pada masyarakat untuk bisa saling menghargai antarumat. Moderasi agama ini sendiri merupakan cara

pandang, sikap dan perilaku beragama yang saling menghargai dan menghormati perbedaan agama. Adapun bentuk kegiatan dari program Moderasi Agama yang dicoba untuk diterapkan seperti gotong royong, jalan santai dan building antar umat.

Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan peneliti terkait data tingkat toleransi. Peneliti menemukan bahwasanya tingkat toleransi di Bangka Belitung mulai dari tahun 2019-2022 justru meningkat. Data ini didapatkan melalui FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama).

Gambar 5 Data Persentase Kerukunan Umat Beragama se-Indonesia

Tren Data KUB					
PROVINSI	2017	2018	2019	2021	2022
Aceh	60,03	64,12	60,24	57,51	65,87
Sumatera Utara	73,53	69,08	76,30	75,52	74,96
Sumatera Barat	66,98	62,49	64,36	67,87	63,42
Riau	67,35	68,41	69,26	66,67	74,32
Jambi	69,20	65,29	70,72	70,40	67,44
Sumatera Selatan	69,24	68,25	72,39	68,79	67,05
Bengkulu	69,22	68,14	71,75	70,27	69,88
Lampung	69,98	68,56	73,09	72,44	72,07
Kep. Bangka Belitung	73,60	70,44	73,12	69,48	74,97
Kepulauan Riau	71,42	71,11	72,80	76,20	85,78
DKI Jakarta	73,93	70,25	71,28	70,28	72,62
Jawa Barat	68,52	65,69	68,51	70,52	72,21
Jawa Tengah	73,75	74,06	74,57	75,12	74,28
DI Yogyakarta	72,93	73,12	74,20	76,03	78,90
Jawa Timur	70,39	70,27	73,69	73,57	72,32
Banten	60,66	65,86	68,87	66,11	68,92
Bali	79,50	75,37	80,07	77,95	76,43
Nusatenggara Barat	72,83	69,57	70,39	67,11	70,84
Nusatenggara Timur	83,42	78,94	81,11	81,07	83,93
Kalimantan Barat	74,17	74,83	76,69	77,61	79,11
Kalimantan Tengah	69,31	72,43	77,82	76,29	76,74
Kalimantan Selatan	68,07	67,32	72,51	65,66	69,68
Kalimantan Timur	73,38	72,30	73,58	74,74	74,23
Sulawesi Utara	80,98	76,30	77,97	79,29	77,11
Sulawesi Tengah	72,53	72,85	79,86	75,11	77,36
Sulawesi Selatan	74,00	71,35	75,03	74,31	75,44
Sulawesi Tenggara	75,15	71,88	75,67	73,92	74,11
Gorontalo	68,83	69,69	73,92	68,74	72,29
Sulawesi Barat	75,75	74,88	73,24	74,62	75,73
Maluku	77,29	72,22	74,09	76,30	79,94
Maluku Utara	66,84	68,63	79,41	70,89	58,79
Papua Barat	78,26	76,21	72,66	78,63	79,78
Papua	81,95	74,82	78,96	80,20	78,55
Kalimantan Utara	74,06	74,04	82,08	75,63	80,59

Sumber: (Dokumentasi dari Kemenag Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2017-2022)

Peneliti mendapatkan 2 data yang berbeda dari FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama) Provinsi Bangka Belitung dan Kemenag Bangka Tengah.

2. Labelling Kelompok Tertentu

Penolakan terhadap Pembangunan PTN ini menimbulkan implikasi pada pandangan kelompok-kelompok tertentu. Orang-orang yang mendukung pembangunan ini dianggap telah bertentangan dengan akidah. Selanjutnya orang-orang yang menolak dianggap bagian dari kelompok-kelompok yang dibubarkan seperti FPI dan HTI. Munculnya pengelompokan label tertentu ini, penulis melihat dan merasakan bahwa membuat diantara kelompok ini menimbulkan saling curiga.

3. Berpotensi Muncul Kebijakan Pindah Lokasi

Dengan adanya penolakan dan kemudian hal ini terjadi yang terus menerus serta tidak bisa diatas. Maka, lokasi pembangunan ini berpotensi untuk dialihkan atau dipindahkan. Berdasarkan hasil wawancara bersama Ka Kanwil Provinsi Bangka Belitung diungkapkan bahwa ada kemungkinan untuk dipindahkan ke Jawa Timur. Dimana Provinsi tersebut siap untuk menerima dan melakukan pembangunan PTN.

KESIMPULAN

Salah satu provinsi di Indonesia dengan penduduk etnis Tionghoa terbesar ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, oleh karena itu, pemerintah pusat berencana untuk mendirikan PTN Konghucu di sana. Namun, rencana ini memicu dua pandangan yang berbeda ada yang setuju dan ada yang tidak setuju atas pembangunan ini. Sebagai implikasi dari kondisi tersebut, masing-masing pihak membangun wacana mereka dan hal ini merupakan strategi untuk mempengaruhi orang lain sehingga wacana yang dikonstruksi menjadi sebuah kebenaran.

Terdapat beberapa sub bab terkait dengan wacana yang dikonstruksi oleh pihak pro diantaranya, PTN Konghucu merupakan solusi untuk problematika pendidikan agama Konghucu dan kesetaraan hak. Realitas yang terjadi selama ini kebanyakan peserta didik tidak mendapatkan ajaran agama yang relevan dengan agama yang dianutnya. Mengingat agama Konghucu merupakan salah satu agama resmi yang ada di Indonesia serta atas dasar kesetaraan hak yang menjadikan pendidikan agama Konghucu sangat urgent untuk didirikan. Dari pihak kontra sendiri beranggapan bahwa membangun PTN Konghucu bukan solusi dari mencetak guru. Serta pemberian status negeri yang ada pada PTN ini dan dikhawatirkan akan timbulnya konflik sosial dengan alasan kecemburuan atas status yang melekat ini. Selain itu ada sebuah prinsip menjaga nilai-nilai dan budaya. Penolakan ini bukan hanya atas dasar kepentingan pribadi akan tetapi merupakan kesepakatan bersama masyarakat dengan berbagai pertimbangan. Dalam hal ini mereka mempertimbangkan ketidakrelevanan titik lokasi pembangunan serta skala pembangunan yang pada awalnya diisukan berskala internasional namun realitanya skala tersebut hanya nasional. Selanjutnya ada kekhawatiran akan terjadinya misionaris konghucu di Bangka Belitung. serta implikasi sosial dan hukum dari pembangunan PTN ini yaitu adanya program moderasi beragama dan terkait dengan pemberian label kelompok ekstrem serta berimplikasi pada pindahnya titik lokasi akibat dari penolakan tersebut.

Dalam hal ini, peneliti menyimpulkan bahwa ternyata yang menjadi penyebab munculnya beragam tafsiran dan kemudian pertarungan wacana pembangunan PTN ini turut disumbangkan oleh miskomunikasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat lokal terkait dengan rencana pembangunan PTN, seperti kurangnya sosialisasi sehingga terdapat beberapa informasi yang simpang siur.

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada akhir tulisan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada Kemendikbudristek yang telah mendanai penelitian ini hingga akhir. Terima kasih kepada Dosen Pendamping yang membersamai dan membantu tim peneliti menyelesaikan penelitian ini. Kepada Universitas Bangka Belitung, Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, Fakultas Hukum, Jurusan Sosiologi dan Jurusan Hukum dalam membantu administrasi penelitian ini. Terima kasih kepada Kakanwil Provinsi Bangka

Belitung, Kepala Dusun Batu Belubang, Akademisi Sosiologi, Akademisi Hukum, Akademisi Agama, serta masyarakat Bangka Belitung

DAFTAR PUSTAKA

- Barker, C. (2004). *Cultural Studies, Teori Dan Praktek*, Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Burhanuddin, N., Nurdin, A. A., & Helmy, M. I. (2019). Religious Conflict And Regional Autonomy In Church Establishment And Islamic Clothing In West Pasaman And Dharmasraya West Sumatera. *Indonesian Journal Of Islam And Muslim Societies*, 9(2), 189–216. <https://doi.org/10.18326/IJIMS.V9I2.189-216>
- Herza, H., Murtada, M. M., & Saputra, P. P. (2023). The Construction Of Moderate Islamic Discourse And The Filmmaker's Political Bias In Ayat-Ayat Cinta 2. *MEDIASI Jurnal Kajian Dan Terapan Media, Bahasa, Komunikasi*, 4(3), 226–245.
- Ibrahim, I., Hidayat, A., & Herza, H. (2022a). Adaptation Of The Political Economy Of The Grassroots Tionghoa Ethnic In Bangka Island, Indonesia. *Masyarakat, Kebudayaan & Politik*, 35(4).
- Ibrahim, I., Hidayat, A., & Herza, H. (2022b). Habitiasi Subkultur Tionghoa Di Tengah Dominasi Melayu Bangka: Politik Berbagai Peran. *Society*, 10(2), 146–162.
- Sakti, A. T. (2022). *Bangkapos.com*.
- Siswanto, A., & Febriana, P. (2017). Representasi Indonesia Dalam Stand Up Comedy (Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough Dalam Pertunjukan Spesial Pandji Pragiwaksono "Mesakke Bangsaku"). *KANAL: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 5(2), 121–130.
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Alfabeta.
- Sya, M., Marta, R. F., & Sadono, T. P. (2019). Tinjauan Historis Simbol Harmonisasi Antara Etnis Tionghoa Dan Melayu Di Bangka Belitung. *Jurnal Sejarah Citra Lekha*, 4(2), 153–168.
- Tribunnews. (2023). *Pendirian PTN Konghucu Di Bangka Belitung Dicanangkan Pemerintah Sejak 2019*. <https://bangka.tribunnews.com/amp/2022/06/01/Pendirian-Ptn-Konghucu-Di-Bangka-Belitung-Dicanangkan-Pemerintah-Sejak-2019>
- Udasmoro, W. (2018). *Hamparan Wacana: Dari Praktik Ideologi, Media, Hingga Kritik Poskolonial*. Penerbit Ombak.

Article submitted 01 Dec 2023. Resubmitted 24 Dec 2023. Final acceptance 31 Dec 2023. Final version published as submitted by the author JSPH – Vol. 8, No. 2, 2023